



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Selasa

Tanggal: 24 Maret 2020

Halaman: 2

DEWAN USULKAN INSENTIF BAGI PETUGAS MEDIS

Anggaran Antisipasi Korona Tak Ada Persoalan

YOGYA (KR) - DPRD Kota Yogya memastikan tidak ada persoalan anggaran terkait antisipasi virus korona di Kota Yogya. Meski alokasi dana tak terduga dalam pos APBD 2020 cukup terbatas, namun ada peluang penggunaan pos lain maupun penggeseran anggaran.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, mengungkapkan hasil rapat koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogya diputuskan persoalan anggaran tidak ada masalah. "Dalam masa kondisi tanggap darurat kali ini penggeseran anggaran cukup mengacu pada rekomendasi gugus tugas penanganan Covid-19. Jadi tidak perlu dibahas bersama dewan," tandasnya usai rapat koordinasi, Senin (23/3).

Pos anggaran tak terduga sebelumnya dialokasikan Rp 3,5 miliar. Akan tetapi sudah banyak tersedot hingga menyisakan ratusan juta rupiah. Namun demikian masih terdapat anggaran

bagi hasil cukai rokok sebesar Rp 5 miliar. Sesuai ketentuan, 75 persen dari alokasi cukai rokok tersebut dapat dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19, sedangkan 25 persennya untuk iur BPJS Kesehatan bagi penerima bantuan iur (PBI).

Oleh karena itu masih ada alokasi Rp 3,75 miliar yang dapat dipergunakan. Dana itu belum termasuk hasil penggeseran anggaran dari tiap OPD yang nilainya bisa mencapai Rp 3 miliar.

Gugus tugas yang sudah dibentuk Pemkot merupakan ujung tombak penanganan Covid-19. Bersapukan anggaran yang dibutuhkan, bisa digeser sesuai rekomendasi," jelasnya.

Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Kota Yogya M Ali Fahmi, mengusulkan ada alokasi anggaran untuk tambahan insentif bagi petugas medis. Pasalnya, petugas pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas kini menjadi garda terdepan dalam penanganan Covid-19. Apalagi mereka juga termasuk golongan rentan yang terpapar karena berinteraksi dengan penderita. (Dhi-o)

Sejumlah upaya yang bisa dilakukan oleh Pemkot, imbuhan Rifki, ialah memperluas ruang isolasi bagi pasien dalam pengawasan (PDP). Bahkan, imbuhan, keberadaan RS Pratama bisa digunakan sepenuhnya untuk ruang isolasi korona. Hal ini karena wabah Covid-19 di Kota Yogya dinilai baru fase awal dan belum mencapai puncaknya.

Selain itu, pengujian atau tes cepat untuk diagnosis Covid-19 juga perlu segera direalisasikan agar ada deteksi dini di masyarakat. "Aset milik Pemkot yang berpotensi menjadi kerumunan masyarakat perlu dikaji kembali operasionalnya. Social distancing harus benar-benar dioptimalkan karena efektif memutus penyebaran wabahnya." (Dhi-o)

☐ Nasud ☐ Amat Sugoro ☐ Untuk Ditu

Dik
a Pe

Kesehatan
PKAD

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPKAD			

Yogyakarta, 29 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005